**PEMBERIAN BANTUAN TRANSPORTASI BAGI SISWA DI KAWASAN
HINTERLAND KOTA BATAM (STUDI KASUS PULAU SARANG)**

Oleh : Dhea Ananda Putri

Dheaanandaputri@gmail.com

Pembimbing : Adi Anto

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR.Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Sarang Island is an island in the Hinterland region of Batam City. The phenomenon that arises in education on the Sarang Island is the government budget for boat fuel money to take children to school less, the mindset of parents of students lacking on the importance of children's education, low economy, and the ability of teachers not yet qualified. The purpose of this study was to determine the development of education on the island of the city of Batam. The concept that can be used in this study is that there are three factors that can influence the success of implementation according to Ripley and Franklin, namely Compliance, Routine Activity, and Policy Performance. The selection of informants in this study used a purposive sampling technique. The results showed that the Batam City Education Office had not been maximized in the development of education in the Hinterland region especially the Sarang Island. Inhibited mindset of parents in education so that school teachers try to change the mindset of parents towards their children's education. The inhibiting factors of the development of the education sector on the island of the Sarang is the profession of parents is a fisherman and a low economy and information that is difficult to enter into the island environment.

Keywords: Policy, Policy implementation, Development of education

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Batam merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah Kota Batam terletak di Pulau Batam, dan seluruh wilayahnya dikelilingi Selat Singapura dan Selat Malaka. Kota Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran Internasional dan memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan penduduk terpesat di Indonesia.

Pendirian Kota Batam dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Batam yang di latar belakanginya oleh tingginya arus migrasi yang masuk oleh karena adanya “efek lampu pijar” (*electric bulb effect*) dari Kota Batam, yang merupakan daya tarik bagi penduduk luar Kota Batam untuk masuk ke Batam dalam rangka mengembangkan usaha ataupun mencari pekerjaan. Dampak berikut dari permasalahan tersebut adalah menyangkut penyediaan fasilitas sosial, fasilitas berusaha ataupun tempat bekerja yang dibutuhkan bagi pendatang, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, tempat berusaha, lapangan pekerjaan dan fasilitas lainnya yang memadai.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi disatu sisi telah menjadikan keberadaan Kota Batam menjadi sangat penting oleh karena peranannya sebagai salah satu mesin pertumbuhan bagi perekonomian nasional, namun disisi lain keberhasilan tersebut telah menimbulkan kesenjangan dengan sebagian besar daerah yang berada di sekitarnya (*Hinterland*). Kesenjangan tersebut terlihat dari tidak adanya akses kegiatan ekonomi di daerah *Hinterland* ke Pulau Batam dan tidak berkembangnya aktifitas masyarakat yang berada di daerah *Hinterland*, perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang cukup tajam, yang disebabkan oleh karena

perbedaan dalam penyediaan fasilitas pelayanan sosial dan pelayanan umum.

Hinterland yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah suatu daerah terpelosok yang berada di perbatasan antarkota atau berada di perbatasan antara Negara Indonesia dengan Negara luar.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Batam dalam rangka mendukung peningkatan pendidikan di Kota Batam tentang dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam. Tujuan pembangunan dan memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita Daerah sesuai dengan Visi, Misi Kepala Daerah, disusun di dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021.

Persebaran sekolah yang merata di kecamatan Kota Batam, Pemerintah Kota Batam khususnya Dinas Pendidikan Kota Batam sudah memaksimalkan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Batam dengan percepat pendidikan yang merata dan berkualitas.

Pemerintah Kota Batam juga mendukung dalam segi beasiswa, seperti beasiswa khusus bagi pelajar dari pulau *Hinterland*. Mereka disekolahkan di bidang-bidang tertentu seperti pelayaran, perikanan, dan sebagainya. Kawasan yang memiliki Kawasan *Hinterland* adalah Kecamatan Belakang Padang.

Pulau Sarang merupakan satu-satunya dari seluruh pulau di Kecamatan Belakang Padang Kota Batam yang memiliki sekolah di daratan yang menerima siswa yang berasal dari pulau terpencil yaitu Pulau Mecan. Siswa dari Pulau Mecan terpaksa mengenyam pendidikan di luar pulau dikarenakan disana tidak ada sekolah, kemudian Pulau Sarang yang menjadi tempat pendidikan siswa dari Pulau Mecan dikarenakan jarak paling terdekat dari pulau. Dilihat dari antusiasnya siswa-siswa dalam menuntut

ilmu di Kawasan *Hinterland* karena faktor lingkungan, siswa dari SDN 008 Pulau Sarang Kota Batam memiliki antusias yang paling besar dibanding dengan siswa dari pulau lain di Kawasan *Hinterland* di Kota Batam. Hal tersebut dikarenakan semangatnya siswa yang berasal dari Pulau Mecan untuk bersekolah di luar pulau yaitu di SDN 008 Pulau Sarang dan mengakibatkan mempengaruhi semangat belajar dari siswa dari Pulau Sarang.

Pemerintah Kota Batam khususnya Dinas Pendidikan Kota Batam dalam meningkatkan kualitas di Pulau Sarang dilakukan memberi bantuan transportasi laut berupa boat sewaan untuk memudahkan siswa melanjutkan sekolah lanjutan di luar pulau, hal tersebut dicantumkan di Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Belakang Padang Nomor : 008/426.4/CD/BLP/2018 tentang Penetapan Siswa Penerima Subsidi Biaya Transportasi Laut Tahun Anggaran 2018.

Dinas Pendidikan sudah baik melakukan meningkatkan mutu pendidikan di Kawasan *Hinterland* khususnya di Pulau Sarang, namun sesuai dengan sumber hasil wawancara masih adanya kendala dalam kelancaran melakukan implementasi yang telah dibuat oleh pemerintah seperti kualitas sumber daya manusia yang masih kurang dan berbeda dengan sumber daya manusia yang ada di perkotaan, kemudian pola pikir orang tua yang kurang terhadap pentingnya pendidikan bagi anaknya, rendahnya tingkat pendidikan orang tua yang menghambat proses belajar anak di rumah karena orang tua adalah orang pertama yang bertugas dalam mendidik anak hingga kualitas pengetahuan anak menjadi baik, lalu rendahnya ekonomi orang tua yang hanya berprofesi sebagai nelayan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan serta fenomena-fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka yang

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemberian bantuan transportasi bagi siswa di Kawasan *Hinterland* Kota Batam khususnya di Pulau Sarang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pemberian bantuan transportasi bagi siswa di Kawasan *Hinterland* Kota Batam khususnya di Pulau Sarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberian bantuan transportasi bagi siswa di Kawasan *Hinterland* Kota Batam khususnya di Pulau Sarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pemberian bantuan transportasi bagi siswa di Kawasan *Hinterland* Kota Batam khususnya di Pulau Sarang.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi untuk instansi terkait yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam penanganan masalah pembangunan pendidikan di Kawasan *Hinterland* di Pulau Sarang Kota Batam dan Dinas Pendidikan Kota Batam dalam melakukan pengembangan pendidikan di Kawasan *Hinterland*.

b. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik, serta menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang

membahas permasalahan yang sama

2.1 KONSEP TEORI

2.1.1 Pembangunan

Pembangunan diartikan sebagai suatu “proses” pembangunan sebagai proses menggambarkan adanya pengembangan baik meliputi proses pertumbuhan ataupun perubahan dalam kehidupan bersama (organisasi) sosial dan budaya. Hal ini merupakan gambaran umum masyarakat luas (*society*). **Mustanir** dalam (**Latif, 2019**)

Pendekatan dalam kegiatan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat, harus diubah dengan pendekatan pembangunan yang berpusat pada masyarakat, artinya perubahan yang berlangsung dalam masyarakat dengan pendekatan pembangunan berorientasi pada masyarakat perlu diubah sebagai figur sentral pembangunan dengan dimensi. Korten dalam (**Latif, 2019**). Sedangkan menurut **Khairuddin** dalam (**Latif, 2019**) pembangunan mengandung unsur-unsur usaha atau proses, peningkatan, kemajuan, atau perubahan kearah kemajuan, berkesinambungan, dilakukan secara sadar atau dengan sengaja, terencana, untuk tujuan pembinaan, dan dilakukan secara bertahap.

2.1.2 Pembangunan Wilayah

Pembangunan wilayah adalah upaya mencapai pembangunan berimbang (*balance development*). Isu pembangunan wilayah atau daerah berimbang yaitu tidak mengharuskan adanya kesamaan tingkat pembangunan antar daerah (*equally developed*), juga tidak menuntut pencapaian tingkat industrialisasi wilayah atau daerah yang seragam, juga bentuk-bentuk keseragaman pola dan struktur ekonomi daerah, atau juga tingkat pemenuhan kebutuhan dasar (*self sufficiency*) setiap wilayah atau daerah. Pembangunan yang berimbang adalah terpenuhinya potensi-potensi pembangunan sesuai dengan kapasitas

pembangunan setiap wilayah atau daerah yang beragam. (**Murry** dalam (**Nofitasari, 2016**))

Pembangunan wilayah menurut (**Nugroho dan Dahuri, 2017**) merupakan upaya-upaya pembangunan sistem kelembagaan sebagai kerangka menyeluruh bagi perbaikan dan penyempurnaan pembangunan. Sedangkan perencanaan pembangunan wilayah adalah konsep yang utuh dan menyatu dengan pembangunan wilayah. Secara luas perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan.

Pada tahapan pembangunan sekarang, menurut (**Rustiadi, 2016**) meskipun kehidupan ekonomi telah mengalami transformasi struktural dari yang tadinya didominasi oleh kegiatan sektor primer (eksploitasi sumberdaya alam) dan pertanian kearah kegiatan industri, tetapi sebagian besar masyarakat wilayah dan pedesaan masih terlibat dalam kegiatan sektor primer tersebut. Dari pengertian di atas, maka terdapat empat hal yang memerlukan perhatian, yaitu:

- 1) menanggukkan konsumsi sekarang untuk dinikmati kemudian melalui investasi modal yang dikorbankan;
- 2) melibatkan unsur teknologi yaitu yang berperan dalam meningkatkan produktivitas;
- 3) mengatur hubungan interdependen antar kepentingan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam;
- 4) memahami dan memanfaatkan pengetahuan mengenai hubungan-hubungan fungsional antara wilayah pedesaan dan Kawasan perkotaan dalam mencapai pembangunan wilayah yang berkeeseimbangan, serta

- 5) menciptakan suatu sistem organisasi yang dilandasi aturan hubungan kelembagaan yang dapat memberdayakan semua pihak yang terlibat dalam meningkatkan produktivitas masyarakat wilayah keseluruhan dengan pertolongan teknologi yang menghemat sumberdaya alam.

2.1.3 Pembangunan Pendidikan

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dan strategis sebagai penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Keberhasilan pembangunan pendidikan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan masyarakat secara menyeluruh dalam menghadapi persaingan global. Memasuki Abad 21 bangsa Indonesia dituntut menyiapkan SDM berkualitas dengan keunggulan kompetitif yang dapat diperoleh melalui pendidikan yang bermutu. (Firman, 2018)

Upaya peningkatan mutu dan pembangunan bidang pendidikan di era otonomi daerah bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, melainkan juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu dan pembangunan bidang pendidikan menjadi isu strategis bagi setiap pemerintah daerah. (Febrianto, 2014) Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan pendidikan, baik perseorangan maupun secara kelompok, karena partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan. (Aswasulasikin, 2015). Menurut Dwiningrum dalam (Aswasulasikin, 2015) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan, ada tiga alasan utama partisipasi masyarakat bersifat sangat penting:

- 1) pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, tanpa

adanya partisipasi program-program pendidikan akan gagal.

- 2) Alasan kedua bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program pendidikan jika masyarakat dilibatkan dalam proses persiapan perencanaannya, pelaksanaan, sampai evaluasi program pendidikan, karena mereka akan mengetahui secara mendasar bagaimana program-program pendidikan yang dilaksanakan.

Alasan ketiga partisipasi menjadi penting dalam pembangunan pendidikan karena timbul anggapan bahwa partisipasi merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pendidikan. Artinya adalah masyarakat memiliki hak untuk menentukan ide dan saran dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan.

2.1.4 Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi menurut Ripley dan Franklin dalam (Meyzi, Adiarto dan Hasim, 2019) adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata. Implementasi yang berhasil tidak hanya ada dua prefektif saja. Pertama, keberhasilan diukur melalui tingkat kepatuhan birokrasi level bawah terhadap birokrasi level atas. Kedua, keberhasilan implementasi dicirikan oleh kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah. Keberhasilan suatu program dapat dilihat jika program itu berjalan sesuai dengan model-model yang telah ditetapkan.

Kemudian Ripley dalam (Meyzi, Adiarto dan Hasim, 2019) menjelaskan implementasi merupakan suatu tahapan antara pembuatan kebijakan dan konsekuensi dari kebijakan. Dimana ia menempatkan implementasi pada tahap ketiga dalam proses kebijakan. Tahap pertama penyusunan agenda, tahap kedua formulasi kebijakan, tahap ketiga

implementasi kebijakan dan tahap keempat dampak dari kebijakan. Selanjutnya beliau menegaskan bahwa implementasi yang berhasil tidak hanya ada dua prefektif yaitu keberhasilan diukur melalui tingkat kepatuhan birokrasi level bawah terhadap birokrasi level atas dan keberhasilan implementasi dicarikan oleh kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada seting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Alasan penelitian ini menggunakan studi kasus karena mendalami fenomena Pemberian Bantuan Transportasi Bagi Siswa di Kawasan *Hinterland* Kota Batam khususnya di Pulau Sarang.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Pulau Sarang, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Adapun alasan penulis mengambil Pulau Sarang sebagai lokasi penelitian tersebut adalah karena Pulau Sarang merupakan pulau di Kawasan *Hinterland* yang sebagian masyarakatnya kurang memahami pentingnya pendidikan anak dan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam khususnya Dinas Pendidikan Kota Batam dalam mensosialisasikan pentingnya pendidikan.

3.3 Informan Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan yang memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian di Pulau Sarang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Belakang Padang Kota Batam
3. Kepala Sekolah SD Negeri 008 Pulau Sarang Belakang Padang
4. Orang tua siswa

3.4 Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Data primer ini diperoleh dari wawancara dengan informan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pencatatan sumber data primer melalui wawancara dan pengamatan yang merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi yang berhubungan dengan Pemberian Bantuan Transportasi Bagi Siswa di Kawasan *Hinterland* Kota Batam Studi Kasus Pulau Sarang. Data yang dibutuhkan antara lain:

1. Evaluasi
2. Jangkauan
3. Pengendalian Biaya

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung yang dapat menunjang objek yang diteliti, yang berupa:

1. Profil Kota Batam
2. Profil Dinas Pendidikan Kota Batam

3. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2012

3.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam wawancara peneliti dapat melakukan wawancara berhadapan dengan partisipasi, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam wawancara dalam kelompok tertentu untuk memperoleh data. Wawancara dilakukan sekaligus melakukan survey ke lokasi penelitian untuk melihat keadaan yang nyata di lapangan. Hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dari narasumber yang berbeda-beda di analisis dan dipahami secara mendalam setelah itu direkap menjadi hasil analisis dan didukung dengan hasil survey yang ditemukan di lapangan. Wawancara dilakukan dari tanggal 21 Mei sampai 26 Juni 2019.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah sebagai berikut:

1. Buku catatan: untuk mencatat pencatatan dengan sumber data
2. Kamera/Telepon Seluler: untuk memotret kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan penelitian.
3. Recorder Telepon Seluler: berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. Penggunaan alat ini dalam wawancara perlu memberi tahu informan apakah diperbolehkan atau tidak.

b. Observasi

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi untuk mengamati segala perilaku dan aktivitas yang ingin diteliti. Teknik ini dimaksud untuk melihat sejauh mana Pemberian Bantuan Transportasi Bagi Siswa di Kawasan *Hinterland* Kota Batam Studi Kasus Pulau Sarang. Dalam pengamatan ini peneliti diperkaya dengan data-data baik dalam bentuk tertulis ataupun bentuk *soft copy* yang didapatkan di Dinas Pendidikan Kota Batam. Data tersebut diteliti dan dipahami lebih mendalam lagi secara berulang-ulang untuk mendapatkan data yang dirasakan dibutuhkan dalam penelitian ini. Observasi ini dilakukan dari Januari 2019 sampai Juni 2019.

c. Dokumentasi

Data yang diambil melalui dokumentasi, yang bertujuan melengkapi data penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, data dapat berupa file, foto dan lain sebagainya. Selama proses penelitian, peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang berupa dokumen publik (seperti Koran, makalah, laporan kantor) atau dokumen *private* (seperti buku harian, *diary*, surat, *e-mail*). Dokumentasi dalam penelitian ini penulis peroleh dari dokumentasi pribadi yang diberikan oleh instansi terkait dan beberapa dokumentasi pribadi yang diambil di lapangan. Dokumentasi dilakukan dari tanggal 21 Mei sampai 26 Juni 2019.

1. Dokumen Dinas Pendidikan Kota Batam
2. Foto hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Belakang Padang Kota Batam

3.6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data mentah yang telah diperoleh pada saat observasi wawancara dan survey. Data

mentah yang diperoleh baik dalam bentuk tertulis, *soft copy*, dan rekaman ataupun catatan penelitian, dikumpulkan untuk kemudian ditranskripkan menjadi sebuah data dan informasi yang lebih sederhana untuk dibaca dan dipahami. Hasil transkrip data wawancara dan survey yang diperoleh disusun berdasarkan kisi-kisi penggalan data yang menjadi instrument dalam penelitian yang telah disusun terlebih dahulu. Kemudian data tersebut disiapkan untuk dibaca dan dipahami agar mudah untuk melakukan analisis dan deskripsi data. Kemudian hasil dari wawancara diidentifikasi sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada beberapa narasumber yang sudah ditetapkan menjadi informan penelitian. Hasil pengelompokan yang dilakukan akan menjadi bahan penelitian untuk mempersiapkan data yang dianalisis.

Pengelompokan data dan mentranskrip data yang telah diperoleh akan dibaca berulang kali agar data tersebut dapat dianalisis dan dimaknai. Proses pembacaan yang berulang dilakukan terhadap hasil wawancara, observasi, dan survey agar dapat memahami secara detail dan mendalam akan data yang diperoleh sehingga hasil wawancara, observasi, dan survey tersebut dapat dimaknai sebagai sebuah kesatuan sebelum dipecah menjadi beberapa bagian.

Klarifikasi data dilakukan dengan menyederhanakan data yang ada dan mengelompokkan data kedalam konsep-konsep kunci (kategorisasi data). Hal tersebut dilakukan dengan mengelompokkan data transkrip yang telah dikategorikan kemudian informasi yang diperoleh disaring untuk dapat dijadikan *database* dalam melakukan analisis. Proses klarifikasi data dilakukan dengan cara manual yang kemudian dituliskan dalam komputer sebagai *database* yang akan dianalisis dan ditafsirkan. Penafsiran data yang telah menjadi *database* berdasarkan kategori yang telah disusun. Kemudian akan dibuatkan kesimpulan sementara berdasarkan data yang telah dikategorikan

(penyimpulan sementara). Setelah itu dilakukanlah cek dan ricek antara satu sumber dengan sumber data lainnya, serta proses trigulasi sumber data.

Untuk menganalisis Pemberian Bantuan Transportasi Bagi Siswa di Kawasan *Hinterland* Kota Batam Studi Kasus Pulau Sarang peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber dan observasi di lapangan, selanjutnya data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara mendalam dan berkali-kali. Selanjutnya meringkas dan mengevaluasi semua informasi mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa tertentu. Kemudian penulis mendeskripsikan dalam Pemberian Bantuan Transportasi Bagi Siswa di Kawasan *Hinterland* Kota Batam Studi Kasus Pulau Sarang disajikan dalam narasi atau laporan kualitatif. Dan akhirnya penulis membandingkan hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari *literature* atau teori.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemberian Bantuan Transportasi Bagi Siswa di Kawasan *Hinterland* Kota Batam (Studi Kasus Pulau Sarang)

4.1.1 *Compliance*/Kepatuhan

Keberhasilan implementasi diukur melalui tingkat kepatuhan birokrasi level bawah terhadap birokrasi level atas. Pemerintah Kota Batam khususnya Dinas Pendidikan Kota Batam sangat memperhatikan kualitas pendidikan di Kawasan *Hinterland* khususnya Pulau Sarang. Untuk mencapai program yang telah dibuat oleh pemerintah mereka berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Pulau Sarang Kota Batam agar tercapainya tujuan. Pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat Batam di Kawasan *Hinterland* menurut perspektif masyarakat harus dilakukan oleh pemerintah Kota Batam. Menurut mereka sudah menjadi tugas pemerintah untuk dapat mengembangkan wilayah *Hinterland* dan memberdayakan

masyarakatnya agar dapat maju seperti yang terjadi pada masyarakat di Kawasan *mainland* dan tidak lagi tertinggal atau terbelakang. Oleh karena itu, menurut masyarakat pulau, sejumlah agenda kebijakan yang perlu dilakukan dan itu merupakan harapan masyarakat di Kawasan *Hinterland* agar dapat dilakukan pemerintah dan merupakan kebutuhan masyarakat meliputi beberapa hal.

Dinas Pendidikan Kota Batam berhasil patuh dalam implementasi yang telah dibuat sesuai dengan standar dan prosedur serta aturan yang ditetapkan oleh kebijakan dilihat dari persiapan dan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Batam khususnya di Kawasan *Hinterland* agar di Kawasan *Hinterland* dan di Kawasan perkotaan sama rata. Namun kualitas pendidikan juga dilihat dari properti pendukung seperti buku, dan berbicara tentang biaya transportasi yang ditempuh untuk dapat sampai ke sekolah. Selain itu, masalah lain efisiensi pengajaran adalah mutu pengajar. Kurangnya mutu pengajar jugalah yang menyebabkan peserta didik kurang mencapai hasil yang diharapkan Sistem pendidikan yang baik juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pendidikan di Kota Batam.

4.1.2 Kegiatan Rutin

Keberhasilan implementasi dicirikan oleh kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah. Keberhasilan suatu program dapat dilihat jika program itu berjalan sesuai dengan model-model yang telah ditetapkan, salah satunya adalah kegiatan rutin. Kegiatan rutin merupakan salah satu indikator dalam keberhasilan implementasi yang dibuat oleh implementor dalam usaha mencapai tujuan yang telah direncanakan. Ada faktor-faktor melancarkan kegiatan program yang dibuat oleh pemerintah seperti faktor pendukung sumber daya manusia. Pendidikan dapat dikatakan bermutu atau berkualitas jika sudah

memenuhi standart. Artinya, produk tersebut harus tepat sesuai dengan tujuan.

Masih adanya kendala dalam merealisasikan implementasi yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota Batam dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kawasan *Hinterland* khususnya Pulau Sarang Kota Batam. Seperti kendalanya kualitas sumber daya manusia yang menunjang keberhasilan pembangunan pendidikan di Kota Batam bahwa masih kurangnya pola pikir guru terhadap pentingnya bahwa kondisi lingkungan manapun tempat mengajar adalah sama dan tidak ada perbedaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh lokasi Kawasan *Hinterland* sangat berbeda di Kawasan Perkotaan yang lebih modern dan terjangkau dimana-mana. Sedangkan di pulau-pulau akses transportasi dan internet sangat susah masuk ke dalam pulau. Kemudian boat yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu melancarkan implementasi yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota Batam telah terealisasikan dan berjalan sesuai apa yang diinginkan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kawasan *Hinterland* khususnya di Pulau Sarang.

4.1.3 Kinerja Kebijakan

Keberhasilan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kawasan *Hinterland* khususnya di Pulau Sarang dilihat dari tingkat kepatuhan birokrasi level bawah terhadap birokrasi level atas dan kelancaran rutinitas yang tidak adanya masalah. Hal tersebut tercapainya tujuan dalam program yang dibuat oleh pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kawasan *Hinterland* agar sama meratanya dengan mutu pendidikan di Kawasan Perkotaan. Keberhasilan tersebut dilihat dari terealisasinya implementasi Pemerintah Kota Batam dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 mengenai pembangunan pendidikan di Kawasan *Hinterland*, dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kawasan *Hinterland* khususnya di Pulau Sarang oleh Dinas Pendidikan Kota Batam dengan dilakukan memberi bantuan transportasi laut berupa boat sewaan untuk memudahkan siswa melanjutkan sekolah lanjutan di luar pulau yang telah dicantumkan pada Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Belakang Padang Nomor : 008/426.4/CD/BLP/2018 tentang Penetapan Siswa Penerima Subsidi Biaya Transportasi Laut Tahun anggaran 2018.

Pemberian bantuan transportasi bagi siswa di Kawasan *Hinterland* Kota Batam khususnya di Pulau Sarang yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Batam dalam meningkatkan mutu pendidikan di Pulau Sarang adalah baik. Dibandingkan dengan dahulu sebelum pemerintah menyediakan transportasi air untuk mengangkut siswa berangkat ke sekolah di luar pulau mereka terkendala tidak bisa melanjutkan sekolah di luar pulau dikarenakan biaya ekonomi keluarga yang rendah dan orang tua tidak sanggup untuk menambah biaya transportasi laut yaitu boat untuk mengantarkan mereka di luar pulau, karena penghasilan orang tua hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian sarana dan prasarana yang tersedia di SDN 008 Pulau Sarang Kota Batam sudah memadai walau belum 100% lengkap. Sarana dan prasarana yang kurang biasanya sekolah membuat laporan untuk diajukan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam agar dinas bisa segera melengkapi sarana dan prasarana yang kurang di sekolah tersebut. Namun sebagian sekolah berinisiatif untuk membeli sendiri sarana prasarana yang kurang misalnya alat-alat pendukung untuk belajar dengan menggunakan dana BOS.

4.2 Faktor Penghambat dalam Pemberian Bantuan Transportasi

Bagi Siswa di Kawasan *Hinterland* Kota Batam (Studi Kasus Pulau Sarang)

4.2.1 Keterbatasan Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia khususnya tenaga pengajar atau guru di Kawasan *Hinterland* masih terbatas. *Mindset* guru yang dipindahkan ke Kawasan *Hinterland* masih kurang terhadap penempatan untuk mengajar dimanapun sebenarnya sama saja. Karena kurangnya tenaga pengajar di Kawasan *Hinterland* karena hal tersebut sekolah terpaksa menerima guru yang berasal dari masyarakat di sana dengan skill pengajar yang masih terbatas. Di Indonesia memang sudah dikatakan kaya akan pendidikan. Tetapi pendidikan di Indonesia semakin hari kualitasnya semakin rendah. Banyak desa pelosok yang menjadikan sumber daya manusia rendah sehingga pendidikan generasi muda sangat berpengaruh. Sebab, ada banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas SDM, tetapi faktor yang dominan yaitu pendidikan, karakter manusia itu sendiri, dan kesehatan. Para pendidik seringkali memaksa kehendaknya tanpa pernah memperhatikan kebutuhan, minat dan bakat yang dimiliki siswanya. Pendidikan seharusnya memperhatikan kebutuhan siswanya bukan justru memaksakan sesuatu yang membuat para siswa kurang nyaman dalam menuntut ilmu. Proses pendidikan yang baik adalah dengan memberikan kesempatan para siswa untuk kreatif, itu harus dilakukan sebab pada dasarnya gaya berfikir siswa tidak bisa diarahkan.

4.2.2 Keterbatasan Pola Pikir Masyarakat

Pendidikan merupakan faktor penting untuk mengejar ketertinggalan dan keterbelakangan. Di Kawasan *Hinterland* diperoleh data hampir 50 % penduduk mempunyai tingkat pendidikan yang sangat rendah dimana mereka tidak tamat SD, sehingga kualitas sumber daya manusianya juga sangat rendah. Dari kesimpulan wawancara di atas persoalan

yang dihadapi masyarakat Kawasan *Hinterland* di Kota Batam memang kualitas sumber daya manusia yang rendah yang salah satunya dicerminkan dari latar belakang capaian pendidikan yang ditamatkan.

Orang tua telah berupaya dalam membantu anak belajar di rumah dan mencoba membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Namun terbatasnya pengetahuan orang tua terhambat dalam membantu belajar anak. Hal tersebut berdampak jelas mempengaruhi mutu anak sehingga orang tua menyerahkan seutuhnya kepada sekolah. Peran orang tua khususnya ibu walau tidak mengerti pelajaran anak setidaknya menanyakan hal apa yang telah terjadi di sekolah, apakah ada tugas yang harus dikerjakan di rumah, atau menemani anak untuk belajar dan mengerjakan tugas dari sekolah. Sehingga terbentuknya motivasi anak untuk belajar dan semangat berangkat ke sekolah. Kemudian kurikulum juga berbeda jauh dibanding dengan yang dulu sehingga membuat orang tua kesulitan membantu anak belajar di rumah. Orang tua diberi sosialisasi oleh sekolah saat penerimaan raport agar membantu anak belajar di rumah.

4.2.3 Transportasi

Masyarakat sudah merasakan kontribusi yang telah pemerintah lakukan untuk membantu orang tua yang kesulitan dalam ekonomi dengan menyediakan boat untuk mengangkut siswa ke pulau seberang namun pemerintah belum memberi anggaran yang sesuai untuk pengeluaran membeli minyak, sehingga sekolah terpaksa menambah anggaran agar uang tersebut cukup untuk membeli minyak.

Masyarakat *Hinterland* di Pulau Sarang merasakan adanya bantuan berupa beasiswa untuk masyarakat miskin, bantuan biaya transportasi bagi siswa yang melakukan penyeberangan laut, bantuan rumah dinas bagi guru-guru di Pulau Sarang agar siswa benar-benar fokus

dalam menuntut ilmu. Ini selalu memprioritaskan siswa-siswa yang secara geografis jauh dari sekolah dan memiliki kemungkinan akan terlambat jika harus pergi dan pulang setiap harinya sehingga waktu siswa hanya terbuang untuk kegiatan pergi dan pulang dari sekolah saja. Masyarakat benar-benar merasakan bagaimana Dinas Pendidikan Kota Batam telah melakukan tugas yang baik terkait peningkatan pengetahuan demi terciptanya tujuan pendidikan di Pulau Sarang.

6. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai Pemberian Bantuan Transportasi Bagi Siswa di Kawasan *Hinterland* Kota Batam Studi Kasus Pulau Sarang yang melibatkan Dinas Pendidikan Kota Batam, maka berikut penulis uraikan beberapa kesimpulan dan saran antara lain:

1. Pemberian Bantuan Transportasi Bagi Siswa di Kawasan *Hinterland* Kota Batam Studi Kasus Pulau Sarang yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Batam dalam meningkatkan mutu pendidikan di Pulau Sarang adalah baik. Dinas Pendidikan Kota Batam telah berupaya untuk memenuhi keberhasilan program untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Pulau Sarang seperti memberikan bantuan kepada siswa yang tidak mampu berupa boat sewaan untuk mengangkut siswa ke sekolah di pulau seberang, kemudian siswa juga mendapatkan pendidikan gratis dari BOS. Kemudian boat yang telah disediakan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam sangat berpengaruh dalam pembangunan pendidikan di Kawasan *Hinterland* khususnya di Pulau Sarang Kota Batam. Lalu adanya keberhasilan dalam implementasi yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota Batam dalam meningkatkan mutu pendidikan di Pulau Sarang Kota Batam. Karena

dibanding dengan yang dulu siswa di SDN 008 Pulau Sarang sangat kesulitan melanjutkan sekolah di jenjang yang lebih tinggi yang berada di pulau seberang karena kendala ekonomi orang tua yang rendah.

2. Faktor-faktor yang menghambat Pemberian Bantuan Transportasi Bagi Siswa di Kawasan *Hinterland* Kota Batam Studi Kasus Pulau Sarang adalah sumber daya manusia menjadi hambatan dalam pembangunan pendidikan di Pulau Sarang Kota Batam seperti pemerintah sudah menyediakan bantuan transportasi berupa boat dan mesinnya, dan telah memberi anggaran untuk bahan bakar boat namun anggaran yang diberi pemerintah untuk bahan bakar tidak mencukupi sesuai dengan kebutuhan boat untuk sehari-hari, sehingga sekolah SDN 008 Pulau Sarang terpaksa menombok sisa anggaran yang kurang agar mencukupi untuk biaya bahan bakar boat yang mengantarkan anak ke sekolah di luar Pulau Sarang. Kemudian tenaga pengajar di Pulau Sarang Kota Batam masih terbatas, Selain itu adanya keterbatasan pola pikir orang tua siswa mengenai pentingnya pendidikan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai Pemberian Bantuan Transportasi Bagi Siswa di Kawasan *Hinterland* Kota Batam Studi Kasus Pulau Sarang, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran mengenai hasil penelitian, bahwa untuk pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kawasan *Hinterland* khususnya Pulau Sarang Kota Batam perlu dilakukan:

1. Adanya penambahan boat dan penambahan anggaran minyak boat untuk mengantarkan siswa pergi ke sekolah di pulau seberang agar sekolah tidak lagi menambah biaya

yang seharusnya bisa digunakan untuk keperluan lain di sekolah.

2. Dinas Pendidikan Kota Batam sebaiknya memberi pelatihan khusus untuk guru dari Kawasan *Hinterland* khususnya di Pulau Sarang agar guru yang masih belum lulusan sarjana bisa terbuka wawasan untuk kemampuan mengajarnya. Sehingga tidak ada lagi perbedaan mutu pendidikan dari kawasan perkotaan dengan di Kawasan *Hinterland*.
3. Sekolah di Pulau Sarang sebaiknya melakukan pertemuan sebulan sekali dengan orang tua siswa untuk menekankan dan membuka mindset mereka bahwa pentingnya pendidikan untuk anaknya bisa menjadi bekal untuk masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, O. S. (2016). *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Di Persimpangan Jalan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). *Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktek*.
- Budi, W. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Cresswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (4th ed.)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinas Pendidikan Kota Batam. (2018). *Profil Pendidikan Kota Batam 2017-2018*. Batam.
- Heriyanto, M., Adiarto & As'ari, H. (2019). *Model Implementasi Program CSR di Indonesia: Praktek di PT. Pertamina RU II Dumai dan PT. Cevron Pacifik Indonesia (CPI) Riau*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Nugroho, I., & Dahuri, R. (2017). *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.

- Nugroho, R (2014). *Public Policy*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Parson. W. (2011). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purwanto, E. A., & Sulistiyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Subarsono. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sujianto. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Theresia, A. (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Skripsi:**
- Akbar, M. F. (2018). *Analisis Teori Pembangunan Studi Mengenai Perkembangan Pembangunan Di Indonesia*, 1–2.
- Faisal, A. (2017). *Studi Tentang Pembangunan Bidang Pendidikan Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas*, 5, 6463–6476.
- Febrianto, P. T. (2014). *Kajian strategis dan prioritas pembangunan pendidikan menengah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Pulau Madura*, 211– 220.
- Marisa, N. (2018). *KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL (Studi Pada Pekon Atar Kuwau dan Pekon Argomulyo)*. Lampung..
- Santoso, E. B. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Balikpapan, (February)*. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v8i2.292>
- LAPOR! - Aspirasi Perbaikan Kualitas Pendidikan di Pulau Sarang, Batam.* (2016). Retrieved from <https://lapor.go.id/pengaduan/1573592/aspirasi-perbaikan-kualitas-pendidikan-di-pulau-sarang-batam.html#>
- Pertumbuhan Dan Perkembangan Kota Batam.* (2016). *Pertumbuhan Dan Perkembangan Kota Batam*. 2016, 1. Retrieved from <https://batam.go.id/profil/geografis>
- Website resmi Badan Pusat Statistika Kota Batam.* (2017). Retrieved October 10, 2018, from <https://batamkota.bps.go.id/>

Publikasi Elektronik: